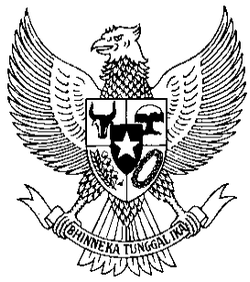

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 82 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 275);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2025 disusun berpedoman pada:

a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 02 Agustus 2024

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 02 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 82

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 82 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penysunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Ngawi menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi untuk periode 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Ngawi, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 tahun. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 I-10 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
30. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
31. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
34. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

40. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94);

48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

49. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun.2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun.2012 Nomor 19);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 9);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1);
54. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
55. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 146 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 32 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 32).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi adalah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi adalah :

a. Memberikan arah, kebijakan dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial selama 1 (satu) tahun anggaran oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Sosial.
b. Sebagai Media Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan efisien menuju terciptanya Tata Pemerintahan yang baik *(Good Governance)*.
c. Sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Recana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, proses penyusunan, keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana K/L dan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan

(Tahun n-1), mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria, Standar Pelayanan Minimal maupun Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah:
c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti Norma Standar Prosedur dan Kriteria, Standar Pelayanan Minimal dan Suistanable Development Goals:
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang:

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan:
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kerjakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ngawi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ngawi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan uraian tentang:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan.
c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, baik jenis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

# BAB II
# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan- tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi ini menyajikan hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ngawi selama tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024.

Evaluasi Tahun 2023, anggaran Dinas Sosial Kabupaten Ngawi sebesar Rp. 30.249.898.987,00 yang terdiri dari 6 program, 15 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 30.104.169.747,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 101,08% dan capaian kinerja keuangan sebesar 92,09%.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024 untuk tahun berjalan yakni tahun 2024 dengan usulan sebesar Rp.27.563.355.634,00 terurai dalam 7 program, 16 kegiatan, 54 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan mencapai 100% baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan.

Beberapa program, kegiatan maupun sub kegiatan belum mencapai target dengan maksimal diantaranya program Penanganan Bencana kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota pada tahun 2023 untuk capaian kinerja hanya 90,52% dari target kinerja. Hal ini dikarenakan capaian target kinerja berdasarkan laporan kejadian bencana baik bencana sosial maupun bencana alam . Program Rehabilitasi Sosial capaian kinerja melebihi target dikarenakan beberapa target indikator berdasarkan respon kasus yang ditangani. Untuk Program Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial capaian indikator kinerja berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Dengan tidak tercapainya target capaian program, kegiatan maupun sub kegiatan akan mempengaruhi capaian program renstra

karena sesuai pengukuran kinerja berjenjang sesuai pembobotan setiap indikator akan mempengaruhi capaian kinerja diatasnya. Namun hal ini tidak berpengaruh secara langsung ke kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan masyarakat.

Untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan maupun sub kegiatan, beberapa kebijakan/ tindakan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran perlu mengambil langkah- langkah diantaranya:

a. Penentuan indikator mengacu pada metode SMART yaitu Spesifik, Measureable, Achieveble, Relevan dan Time Bond.
b. Penentuan target berdasarkan prinsip achievable artinya target ditetapkan masih bisa dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia dan berdasarkan data capaian realisasi tahun- tahun sebelumnya dan kondisi saat ini.
c. Lebih cermat dalam penyusunan anggaran kas sesuai ketersediaan dana.

Berikut adalah gambaran evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dan pencapaian Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan

Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2024

Kabupaten Ngawi

Nama SKPD : Dinas Sosial

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (renstra SKPD) Tahun 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja SKPD tahun 2023 | Realisasi Renja SKPD tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1.06 1.06.01 01 | Program pelayanan administrasi perkantoran | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang dikirim | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon yang dibayar | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah rekening air yang dibayar | - | 36 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah rekening listrik yang dibayar | - | 48 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah rekening internet yang dibayar | - | 36 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 1.06.01 01.004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajak nya | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 01.005 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pembayaran honor | - | 270 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 01.006 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan ATK | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 01.007 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang yang dicetak | - | 10012 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah barang yang digandakan | - | 40120 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 01.008 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 01.009 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah surat kabar yang disediakan | - | 2544 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah publikasi ke media cetak dan elektronik | - | 61 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 01.010 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan yang disediakan | - | 1785 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah minuman yang disediakan | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 01.011 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri/diikuti | - | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 01.012 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang dihadiri/diikuti | - | 192 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02.002 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dibeli/diadakan | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02.003 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung yang dibeli/diadakan | - | 2 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 1.06.01 02.004 | Pengadaan Meubelair | Jumlah meubelair yang dibeli/diadakan | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02.006 | Pengadaan Peralatan Kerja | Jumlah peralatan kerja yang dibeli/diadakan | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02.009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang direhab | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02.010 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | - | 700 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02.011 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02.012 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02.013 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair | Jumlah pemeliharaan mebeulair | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02.016 | Pemeliharaan Peralatan Kerja | Jumlah pemeliharaan peralatan kerja | - | 123 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 02.017 | Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor | Jumlah alat kebersihan yang dibeli | - | 298 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah bahan kebersihan yang dibeli | - | 378 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah pembayaran jasa kebersihan | - | 48 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 03 | Program peningkatan disiplin aparatur | Persentase aparatur yang disiplin | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 03.002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan | - | 108 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 03.004 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah pakaian olah raga yang dibeli/diadakan | - | 36 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah sepatu olahraga yang dibeli/diadakan | - | 36 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 05 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya | - | 100 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 1.06.01 05.002 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 05.003 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 06 | Program peningkatan capaian kinerja dan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan satuan kerja pengelola keuangan daerah | Persentase ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD dan SKPKD | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 06.001 | Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja OPD/SKPD | Jumlah dokumen perencanaan penganggaran OPD yang disusun tepat waktu | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah dokumen Laporan kinerja OPD yang disusun Tepat waktu | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 06.006 | Penyusunan Laporan Keuangan OPD/SKPD | Jumlah laporan keuangan OPD yang disusun tepat waktu | - | 46 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 15 | Program Penanganan Fakir Miskin | Jumlah fakir miskin yang diberdayakan | - | | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 15.001 | Penanganan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan | Jumlah data fakmis yang terbarukan | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah Fakir miskin yang menindaklanjuti hasil bimbingan sosial dan ketrampilan | - | 360 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah penerima BPNT yang telah menggunakan e-warung | - | 94487 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 16 | Program Rehabilitasi Sosial | Jumlah PMKS menerima pelayanan rehabilitasi sosial | - | | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 16.001 | Penanganan Rehabilitasi Sosial bagi anak dan usia lanjut | Jumlah PMKS anak yang difasilitasi ke panti/yayasan/UPT/PSBR | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah kasus anak diselesaikan (ABH, AT, Balita/Anak korban kekerasan/adopsi, anak jalanan) | - | 40 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah peserta bimbingan sosial dan keterampilan anak | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah Lanjut Usia terlantar yang menerima bantuan permakanan | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi ke panti/yayasan | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah lanjut usia terlantar/ miskin yang menerima bantuan | - | 110 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 16.002 | Penanganan Rehabilitasi Sosial bagi disabilitas | Jumlah disabilitas yang mendapatkan bimbingan sosial dan ktrampilan | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah disabilitas yang dibantu alat | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah disabilitas mendapat bantuan | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah disabilitas mendapat bantuan permakanan | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah disabilitas yang difasilitasi | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 16.003 | Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang | Jumlah penjemputan, pengantaran dan bantuan bagi korban perdagangan orang, gepeng, anak jalanan, tuna sosial dll | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah Eks WBP mendapatkan bibingan sosial dan keterampilan | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah rakor penanganan tuna sosial dan KPO yang dilaksanakan | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah peserta sosialisasi | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 16.004 | Pengelolaan Shelter | Jumlah orang yang memanfaatkan shelter/penampungan/rumah aman | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 17 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | cakupan penerima bantuan sosial yang tepat sasaran | - | | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 17.001 | Perlindungan Sosial Korban Bencana alam | Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan bantuan | - | 14 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah sukarelawan kebencanaan kategori terampil | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah korban bencana alam yang mendapat permakanan (dapur umum) | - | 153 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 17.002 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial | Jumlah peserta sosialisasi | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah orang terlantar yang menerima bantuan sosial | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
| | | Persentase korban bencana sosial yang menerima bantuan sosial | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 17.003 | Fasilitasi Jaminan Sosial Keluarga | Jumlah Pendamping Sosial PKH yang menindak lanjuti hasil Bimtek P2K2 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang menindak lanjuti hasil Pertemuan Peningkatan Kemapuan Keluarga (P2K2)/FDS | - | 380 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah hasil koordinasi Tim Pelaksana PKH yang ditindaklanjuti | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 18 | Program Pemberdayaan Sosial | Jumlah PSKS aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | - | | - | - | - | - | - | - |
| 1.06 1.06.01 18.001 | Pemberdayaan Sosial Perorangan, Kelompok dan Masyarakat | Jumlah peserta yang menindak lanjuti bimtek bagi PSM (pendamping sosial masyarakat) | - | 57 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah peserta yang menindak lanjuti Hasil bimbingan sosial dan ketrampilan bagi karang taruna | - | 0 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 1.06.01 18.002 | Fasilitasi Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial | Jumlah even Hari kesetiakawanan Sosial dilaksanakan | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah peserta Karang Taruna yang menindaklanjuti hasil BIMTEK | - | 76 | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah peserta sarasehan nilai-nilai Kepahlawanan | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 1.6.1 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun | 100% | - | 100,00% | 99,32% | 99,32 | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 1 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu | 100% | - | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.01.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun | 20 Dokumen | - | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| | | Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun | 70 Dokumen | - | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 100 | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.01.7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan kinerja OPD yang disusun | 55 Dokumen | - | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 100 | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 100% |
| 1.6 1.6.1 1 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 100% | - | 100,00% | 98,34% | 98,34 | 100,00% | 100,00% | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.02.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun | 130 Dokumen | - | - | - | - | 26 Dokumen | 26 Dokumen | 100% |
| | | Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 6163 Kali | - | 936 Kali | 874 Kali | 93,38 | 1040 Kali | 1040 Kali | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.02.5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan | 6 Dokumen | - | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 1.6.1 1.2.02.7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun | 288 Laporan | - | 48 Laporan | 48 Laporan | 100 | 48 Laporan | 48 Laporan | 100% |
| | | Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun | 12 Laporan | - | 2 Laporan | 2 Laporan | 100 | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% |
| 1.6 1.6.1 1 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun | 100 | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.05.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang dibeli/ diadakan | 744 Meter | - | - | - | - | 114 Meter | 114 Meter | 100% |
| | | Jumlah pakaian batik yang dibeli/ diadakan | 82 Potong | - | - | - | - | 38 Potong | 38 Potong | 100% |
| | | Jumlah atribut pakaian yang dibeli/ diadakan | 208 Buah | - | - | - | - | 38 Buah | 38 Buah | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 1.6.1 1 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun | 100% | - | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.06.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan | 100% | - | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.06.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | 100% | - | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.06.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah makanan yang disediakan | 9942 Kotak | - | 1948 Kotak | 1948 Kotak | 100 | 1550 Kotak | 1550 Kotak | 100% |
| | | Jumlah minuman yang disediakan | 300 Dus | - | 50 Dus | 50 Dus | 100 | 50 Dus | 50 Dus | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.06.5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang yang dicetak | 16800 Lembar | - | 2800 Lembar | 2800 Lembar | 100 | 2800 Lembar | 2800 Lembar | 100% |
| | | Jumlah barang yang digandakan | 145098 Lembar | - | 24183 Lembar | 24183 Lembar | 100 | 24183 Lembar | 24183 Lembar | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah publikasi ke media cetak dan elektronik | 212 Kali | - | - | - | - | 21 kali | 21 kali | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.06.6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah publikasi ke media cetak dan elektronik | - | - | 32 Kali | 32 Kali | 100 | - | - | 100% |
| | | Jumlah surat kabar yang disediakan | 15264 Eksemplar | - | 2544 Eksemplar | 2544 Eksemplar | 100 | 2544 Eksemplar | 2544 Eksemplar | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.06.9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri/diikuti | 372 kali | - | 30 Kali | 30 Kali | 100 | 57 kali | 57 kali | 100% |
| | | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri/diikuti | 510 Kali | - | 53 Kali | 53 Kali | 100 | 70 kali | 70 kali | 100% |
| 1.6 1.6.1 1 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun | 100% | - | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.07.2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang diadakan | 7 Unit | - | - | - | - | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.07.5 | Pengadaan Mebel | Jumlah meubelair yang diadakan | 96 Unit | - | - | - | - | 23 Unit | 23 Unit | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.07.6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan kantor yang diadakan | 34 Unit | - | 3 Unit | 3 Unit | 100 | 13 Unit | 13 Unit | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan | 13 Unit | - | 1 Unit | 1 Unit | 100 | - | - | - |
| 1.6 1.6.1 1 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | - | 100,00% | 98,96% | 98,96 | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.08.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon yang dibayar | 72 Rekening | - | 12 Rekening | 12 Rekening | 100 | 12 Rekening | 12 Rekening | 100% |
| | | Jumlah rekening listrik yang dibayar | 288 Rekening | - | 48 Rekening | 48 Rekening | 100 | 48 Rekening | 48 Rekening | 100% |
| | | Jumlah rekening air yang dibayar | 216 Rekening | - | 36 Rekening | 36 Rekening | 100 | 36 Rekening | 36 Rekening | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah rekening internet yang dibayar | 216 Rekening | - | 36 Rekening | 36 Rekening | 100 | 36 Rekening | 36 Rekening | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.08.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat kebersihan yang dibeli | 720 Buah | - | 100 Buah | 100 Buah | 100 | 59 Buah | 59 Buah | 100% |
| | | Jumlah bahan kebersihan yang dibeli | 2520 Buah | - | 369 Buah | 369 Buah | 100 | 137 Buah | 137 Buah | 100% |
| | | Jumlah pembayaran jasa kebersihan | 288 Kali | - | 48 Kali | 48 Kali | 100 | 48 Kali | 48 Kali | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.08.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pembayaran honor | 504 Kali | - | 66 Kali | 66 Kali | 91,67 | 84 Kali | 84 Kali | 100% |
| 1.6 1.6.1 1 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun | 100% | - | 100,00% | 98,81% | 98,81 | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.09.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan kendaraan jabatan | 72 Kali | - | 12 Kali | 12 Kali | 100 | 12 Kali | 12 Kali | 100% |
| | | Jumlah kendaraan jabatan yang dibayar pajaknya | 1 Unit | - | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.09.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | 210 Kali | - | 35 Kali | 35 Kali | 100 | 60 kali | 60 kali | 100% |
| | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya | 12 Unit | - | 12 Unit | 11 Unit | 91,67 | 12 Unit | 12 Unit | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.09.5 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah pemeliharaan mebeulair | 90 Kali | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 1.6.1 1.2.09.6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan kerja yang dipelihara | 984 Kali | - | 164 Kali | 164 Kali | 100 | 215 kali | 215 kali | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 1.6.1 1.2.09.9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 1290 M2 | - | 175 m2 | 175 m2 | 100 | 190 M2 | 190 M2 | 100% |
| 1.6 1.6.1 1.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | - | - | 30 Kali | 30 Kali | 100 | - | - | - |
| 1.6 1.6.1 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS Aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial | 70% | - | 50% | 50% | 100% | 55% | 55% | 100% |
| 1.6 1.6.1 2 2.02 | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase tindak lanjut Forum tanggung jawab sosial | 100% | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 2 2.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah perusahaan yang mengikuti Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial | 44 Perusahaan | - | - | - | - | 10 Perusahaan | 10 Perusahaan | 100% |
| 1.6 1.6.1 2 2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah PSKS yang menindaklanjuti pemberdayaan | 214 PSKS | - | 89 PSKS | 89 PSKS | 150 | 100 PSKS | 100 PSKS | 100% |
| 1.6 1.6.1 2.2.03.1 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang menerima peningkatan kemampuan | - | - | 60 PSM | 60 PSM | 100 | - | - | 100% |
| | | Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang menerima peningkatan kemampuan | 360 Orang | - | - | - | - | 41 PSM | 41 PSM | 100% |
| | | Jumlah IPSM (Ikatan PSM) difasilitasi | 30 IPSM | - | - | - | - | 1 IPSM | 1 IPSM | 100% |
| | | Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 1.6.1 2.2.03.2 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang menerima peningkatan kemampuan | 19 TKSK | - | 19 TKSK | 19 TKSK | 100 | 19 TKSK | 19 TKSK | 100% |
| 1.6 1.6.1 2.2.03.4 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang menerima kemampuan | - | - | 3 Karang Taruna | 9 Karang Taruna | 300 | - | - | 100% |
| | | Jumlah pelayanan lembaga bidang kesejahtreraan sosial yang ditingkatkan kualitasnya | 42 Karang Taruna | - | - | - | - | 1 Karang Taruna | 1 Karang Taruna | 100% |
| | | Jumlah FK Kartar yang di fasilitasi | - | - | - | - | - | 4 Karang Taruna | 4 Karang Taruna | 100% |
| | | Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas | 15 Lembaga | - | - | - | - | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 100% |
| | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 16 Kali | - | - | - | - | 4 kali | 4 kali | 100% |
| 1.6 1.6.1 2.2.03.5 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang menerima peningkatan kemampuan | - | - | 1 LK3 | 1 LK3 | 100 | - | - | - |
| | | Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang menerima penguatan | 1 LK3 | - | - | - | - | 1 LK3 | 1 LK3 | 100% |
| 1.6 1.6.1 3 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan | 100% | - | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 1.6.1 3 2.01 | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal | Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi Kabupaten | 50 Orang | - | 5 Orang | 5 Orang | 100 | 10 Orang | 10 Orang | 100% |
| 1.6 1.6.1 3.2.01.1 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal | Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi Kabupaten ke desa/ kelurahan asal | | - | 5 Orang | 5 Orang | 100 | 10 Orang | 10 Orang | 100% |
| 1.6 1.6.1 4 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | 100% | - | 100 | 100 | 100 | 55% | 55% | 100% |
| 1.6 1.6.1 4 2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima pelayanan sosial | - | - | 516 Orang | 496 Orang | 96,12 | - | - | - |
| | | Jumlah PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | 1198 Orang | - | - | - | - | 1198 Orang | 1198 Orang | 100% |
| 1.6 1.6.1 4.2.01.1 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan permakanan | - | - | 133 Orang | 133 Orang | 100 | - | - | - |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi | 1485 Orang | - | - | - | - | 105 Orang | 105 Orang | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 1.6.1 4.2.01.3 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan alat bantu | - | - | 18 Orang | 18 Orang | 100 | - | - | - |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu | 367 Orang | - | - | - | - | 10 Orang | 10 Orang | 100% |
| | | Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter | 6 Unit | - | - | - | - | 6 Unit | 6 Unit | 100% |
| 1.6 1.6.1 4.2.01.5 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial | - | - | 50 Orang | 50 Orang | 100 | - | - | - |
| | | Jumlah PMKS/PPKS Disabilitas menerima bantuan | - | - | 115 Orang | 115 Orang | 100 | - | - | - |
| | | Jumlah PMKS/PPKS Lansia menerima bantuan | - | - | 135 Orang | 135 Orang | 100 | - | - | - |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau | 1201 Orang | - | - | - | - | 40 orang | 40 orang | 100% |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial | 840 Orang | - | - | - | - | 20 orang | 20 orang | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat | 10 Kali | - | - | - | - | 10 kali | 10 kali | 100% |
| | | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 80% | - | - | - | - | 0% | 0% | - |
| | | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 80% | - | - | - | - | 0% | 0% | - |
| | | Jumlah Pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan | 50 Orang | - | - | - | - | 50 Orang | 50 Orang | 100% |
| | | Persentase Lansia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 80% | - | - | - | - | 0% | 0% | - |
| | | Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar | 1 Lokasi | - | - | - | - | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 100% |
| | | Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah | 1 Orang | - | - | - | - | 1 Orang | 1 Orang | 100% |
| | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 20 Kali | - | - | - | - | 4 kali | 4 kali | 100% |
| 1.6 1.6.1 4.2.01.6 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Bimbingan | - | - | 25 Orang | 25 Orang | 100 | - | - | - |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga | 402 Orang | - | - | - | - | 60 Orang | 60 Orang | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 1.6.1 4.2.01.12 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rujukan | - | - | 20 Orang | 20 Orang | 100 | - | - | - |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk | 550 Orang | - | - | - | - | 50 Orang | 50 Orang | 100% |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar | - | - | - | - | - | 10 Orang | 10 Orang | 100% |
| 1.6 1.6.1 4 2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV AIDS dan Napza di luar Panti Sosial | Jumlah PPKS lainnya mendapat pelayanan rehabilitasi sosial | 1198 Orang | - | - | - | - | 1198 Orang | 1198 Orang | 100% |
| 1.6 1.6.1 4 2.02.14 | Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Kemitraan pelayanan rehabilitasi sosial di fasilitasi | 55 Kali | - | - | - | - | 3 kali | 3 kali | 100% |
| | | Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki | 1 Data | - | - | - | - | 1 data | 1 data | 100% |
| | | Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM | 1 Data | - | - | - | - | 1 data | 1 data | 100% |
| | | Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas | 5 Lembaga | - | - | - | - | 1 lembaga | 1 lembaga | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 1.6.1 5 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Cakupan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial | 70% | - | 43.000 KPM | 45.155 KPM | 105% | 50% | 50% | 100 |
| 1.6 1.6.1 5 2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data fakmis yang terbarukan | - | - | 1 Data | 1 Data | 100 | - | - | - |
| 1.6 1.6.1 5.2.02.1 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data fakir miskin yang terbarukan | - | - | 1 Database | 1 Database | 100 | - | - | - |
| | | Jumlah fakir miskin yang menindaklanjuti hasil bimbingan sosial dan ketrampilan | - | - | 50 KPM | 50 KPM | 100 | - | - | - |
| | | Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | 70% | - | - | - | - | 50% | 50% | 100% |
| | | Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki | 1 Data | - | - | - | - | 1 Data | 1 Data | 100% |
| | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 20 Kali | - | - | - | - | 4 Kali | 4 Kali | 100% |
| 1.6 1.6.1 5.2.02.3 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah SDM PKH yang menangani KPM PKH | - | - | 152 SDM PKH | 152 SDM PKH | 100 | - | - | - |
| | | Jumlah Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat | 43000 KPM | - | - | - | - | 46.334 KPM | 46.334 KPM | 100% |
| | | Jumlah pendamping PKH yang ditingkatkan kapasitasnya | 150 SDM PKH | - | - | - | - | 146 SDM PKH | 146 SDM PKH | 100% |
| | | Jumlah KPM yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah | 5500 KPM | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah KPM PKH yang menindaklanjuti Bimtek Wira Usaha | 25 Orang | - | - | - | - | 40 orang | 40 orang | 100% |
| | | Jumlah KPM PKH yang memperoleh P2K2 | 760 KPM | - | - | - | - | 46.334 KPM | 46.334 KPM | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Laporan yang ditindaklanjuti | 95 Laporan | - | - | - | - | 19 Laporan | 19 Laporan | 100% |
| | | Jumlah Mahasiswa miskin berprestasi yang mendapat bantuan | 200 Orang | - | - | - | - | 200 Orang | 200 Orang | 100% |
| | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 40 Orang | - | - | - | - | 8 kali | 8 kali | 100% |
| 1.6 1.6.1 5.2.02.4 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Fakir Miskin mendapatkan Bantuan Sosial Ekonomi Produktif | 625 Orang | - | - | - | - | 40 orang | 40 orang | 100% |
| 1.6 1.6.1 6 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase penanganan bencana | 100% | - | 869 Orang | 270 Orang | 68,88 | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 6 2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Persentase korban bencana mendapatkan bantuan | 100% | - | 869 Orang | 270 Orang | 37,76 | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 1.6.1 6.2.01.1 | Penyediaan Makanan | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penyediaan makanan | - | - | 869 Orang | 270 Orang | 37,76 | - | - | - |
| | | Jumlah korban bencana Alam yang mendapatkan makanan | 7000 Orang | - | - | - | - | 650 Orang | 650 Orang | 100% |
| | | Jumlah Paket Permakanan khusus bagi kelompok rentan | 50 Orang | - | - | - | - | 50 Orang | 50 Orang | 100% |
| | | Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang dimiliki | 10 Lokasi | - | - | - | - | 9 Lokasi | 9 Lokasi | 100% |
| | | Jumlah Korban Bencana yang menerima paket sandang | 800 Orang | - | - | - | - | 50 Orang | 50 Orang | 100% |
| | | Jumlah Korban bencana yang menerima Pelayanan Dukungan sosial | 550 Orang | - | - | - | - | 50 Orang | 50 Orang | 100% |
| | | Jumlah Korban Bencana sosial yang mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial | 50 Orang | - | - | - | - | 50 Orang | 50 Orang | 100% |
| | | Jumlah Orang terlantar yang mendapatkan bantuan | 60 Orang | - | - | - | - | 25 orang | 25 orang | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 1.6.1 6 2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Taruna Siaga Bencana yang menerima peningakatan kemampuan | 40 Orang | - | 22 Orang | 22 Orang | 100 | 33 Orang | 33 Orang | 100% |
| 1.6 1.6.1 6.2.02.2 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 31 Kali | - | 3 Kali | 3 Kali | 100 | 3 Kali | 3 Kali | 100 |
| | | Jumlah warga masyarakat rawan bencana yang mendapatkan Kesiapsiagaan dan mitigasi (KSB) | 450 Orang | - | - | - | - | 50 Orang | 50 Orang | 100% |
| | | Jumlah kelompok Masyarakat dilokasi rawan Bencana yang mendapatkan pencegahan konflik | 50 Pokmas | - | - | - | - | 50 Pokmas | 50 Pokmas | 100% |
| | | Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap di Tugaskan | 3 Orang | - | - | - | - | 3 Orang | 3 Orang | 100% |
| | | Jumlah Pekerja Profesional/ Tenaga Kesos/ atau Relawan Sosial yang tersedia | 36 Orang | - | - | - | - | 36 Orang | 36 Orang | 100% |
| 1.6.1.6.1.7 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Cakupan Taman Makam Pahlawan yang dikelola | 100% | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% |
| 1.6.1.6.1.7.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola | 1 Lokasi | - | - | - | - | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 100% |
| 1.6.1.6.1.7.2.01.2 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota | Jumlah pembayaran tenaga kebersihan TMP | 144 Kali | - | - | - | - | 24 Kali | 24 Kali | 100% |
| | | Jumlah pemeliharaan TMP dalam setahun | 12 Kali | - | - | - | - | 2 Kali | 2 Kali | 100% |

DINAS SOSIAL

Triwulan I Periode Pelaksanaan Tahun 2024

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | Kode | | | | Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2024 | | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2024) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6+12 | | 15 = 14/5x100 | | 16 | 17 |
| | | | | | | | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | 0 | | | | NON URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | NON URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 1 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 1 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14,00 | Dokumen | 18.000.000 | 0 | 0 | 14,00 | 18.000.000 | 12,00 | 16.474.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 16.474.500 | 85,71 | 92 | 12,00 | 16.474.500 | 85,71 | 91,53 | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 | Dokumen | 18.000.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 | Dokumen | 18.000.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 | Dokumen | 18.000.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen | 0 | Dokumen | 18.000.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | DINAS | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SOSIAL | |
| | 0 | 0 | 1 | 02 | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1,00 | Dokumen | 1.000.000 | 0 | 0 | 1,00 | 1.000.000 | 1,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1.000.000 | 100,00 | 100 | 1,00 | 1.000.000 | 100 | 100 | DINAS SOSIAL | |
| | 0 | 0 | 1 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2,00 | Dokumen | 5.500.000 | 0 | 0 | 2,00 | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS SOSIAL | |
| | 0 | 0 | 1 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | 2,00 | Dokumen | 1.500.000 | 0 | 0 | 2,00 | 1.500.000 | 2,00 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 1.500.000 | 100,00 | 100 | 2,00 | 1.500.000 | 100 | 100 | DINAS SOSIAL | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dokumen DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 1 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 4,00 | Dokumen | 4.490.000 | 0 | 0 | 4,00 | 4.490.000 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0 | 50,00 | 0 | 2,00 | 0 | 50 | 0 | DINAS SOSIAL | |
| | 0 | 0 | 1 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7,00 | Laporan | 1.000.000 | 0 | 0 | 7,00 | 1.000.000 | 3,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 1.000.000 | 42,86 | 100 | 3,00 | 1.000.000 | 42,86 | 100 | DINAS SOSIAL | |
| | 0 | 0 | 1 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 1 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun | 28,00 | Dokumen | 4.140.519.568 | 0 | 0 | 28,00 | 4.140.519.568 | 6,00 | 644.819.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 644.819.777 | 21,43 | 16 | 6,00 | 644.819.777 | 21,43 | 15,57 | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan | 906,00 | Orang/Bulan | 4.140.519.568 | 0 | | 906,00 | | 198,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 198,00 | | 21,85 | | 198,00 | | 21,85 | | DINAS SOSIAL | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 1 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1,00 | Laporan | 3.000.000 | 0 | 0 | 1,00 | 3.000.000 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 100,00 | 0 | 1,00 | 0 | 100 | 0 | DINAS SOSIAL | |
| | 0 | 0 | 1 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 50,00 | Laporan | 1.000.000 | 0 | 0 | 50,00 | 1.000.000 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 24,00 | 0 | 12,00 | 0 | 24 | 0 | DINAS SOSIAL | |
| | 0 | 0 | 1 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 1 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi | Jumlah Orang yang | 35,00 | Orang | 100.000.000 | 0 | 0 | 35,00 | 100.000.000 | 35,00 | 49.467.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,00 | 49.467.150 | 100,00 | 49 | 35,00 | 49.467.150 | 100 | 49,47 | DINAS | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Peraturan Perundang-Undangan | Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SOSIAL | |
| | 0 | 0 | 1 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 1 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1,00 | Paket | 7.702.980 | 0 | 0 | 1,00 | 7.702.980 | 1,00 | 7.698.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 7.698.000 | 100,00 | 100 | 1,00 | 7.698.000 | 100 | 99,94 | DINAS SOSIAL | |
| | 0 | 0 | 1 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2,00 | Paket | 62.320.000 | 0 | 0 | 2,00 | 62.320.000 | 2,00 | 47.257.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 47.257.000 | 100,00 | 76 | 2,00 | 47.257.000 | 100 | 75,83 | DINAS SOSIAL | |
| | 0 | 0 | 1 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4,00 | Paket | 5.261.120 | 0 | 0 | 4,00 | 5.261.120 | 4,00 | 5.225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 5.225.000 | 100,00 | 99 | 4,00 | 5.225.000 | 100 | 99,31 | DINAS SOSIAL | |
| | 0 | 0 | 1 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan | 2,00 | Paket | 35.448.000 | 0 | 0 | 2,00 | 35.448.000 | 2,00 | 8.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 8.840.000 | 100,00 | 25 | 2,00 | 8.840.000 | 100 | 24,94 | DINAS SOSIAL | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Penggandaan yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah barang yang digandakan | 50.045,00 | Lembar | 35.448.000 | 0 | | 50.045,00 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 12 | | 23,98 | | 12 | | 23,98 | | DINAS SOSIAL | |
| | 0 | 0 | 1 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 132,00 | Dokumen | 14.730.000 | 0 | 0 | 132,00 | 14.730.000 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 0 | 25,00 | 0 | 33,00 | 0 | 25 | 0 | DINAS SOSIAL | |
| | 0 | 0 | 1 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8,00 | Laporan | 2.400.000 | 0 | 0 | 8,00 | 2.400.000 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 50,00 | 0 | 4,00 | 0 | 50 | 0 | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah mamin kunjungan tamu yang disediakan | 100 | Kotak | 2.400.000 | 0 | | 100 | | 50,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 50 | | DINAS SOSIAL | |
| | 0 | 0 | 1 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 140,00 | Laporan | 140.203.000 | 0 | 0 | 140,00 | 140.203.000 | 30,00 | 14.730.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 14.730.000 | 21,43 | 11 | 30,00 | 14.730.000 | 21,43 | 10,51 | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah mamin rapat | 1,6 | Kotak | 140.203.000 | 0 | | 1,6 | | 420,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 420,00 | | 26,25 | | 420,00 | | 26,25 | | DINAS | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SKPD yang disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SOSIAL | |
| | 0 | 0 | 1 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 1 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1,00 | Unit | 2.956.000 | 0 | 0 | 1,00 | 2.956.000 | 1,00 | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 2.600.000 | 100,00 | 88 | 1,00 | 2.600.000 | 100 | 87,96 | DINAS SOSIAL | |
| | 0 | 0 | 1 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2,00 | Unit | 21.000.000 | 0 | 0 | 2,00 | 21.000.000 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0 | 100,00 | 0 | 2,00 | 0 | 100 | 0 | DINAS SOSIAL | |
| | 0 | 0 | 1 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 1 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 144,00 | Laporan | 127.721.740 | 0 | 0 | 144,00 | 127.721.740 | 36,00 | 19.778.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,00 | 19.778.652 | 25,00 | 15 | 36,00 | 19.778.652 | 25 | 15,49 | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah iklan/publikasi media cetak dan | 15,00 | Kali | 127.721.740 | 0 | | 15,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | DINAS SOSIAL | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 1 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24,00 | Laporan | 36.000.000 | 0 | 0 | 24,00 | 36.000.000 | 4,00 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 6.000.000 | 16,67 | 17 | 4,00 | 6.000.000 | 16,67 | 16,67 | DINAS SOSIAL | |
| | 0 | 0 | 1 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 84,00 | Laporan | 91.540.000 | 0 | 0 | 84,00 | 91.540.000 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 0,00 | 3 | 0 | 2.300.000 | 0 | 2,51 | DINAS SOSIAL | |
| | 0 | 0 | 1 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 1 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan | 13,00 | Unit | 51.040.000 | 0 | 0 | 13,00 | 51.040.000 | 3,00 | 8.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 8.600.000 | 23,08 | 17 | 3,00 | 8.600.000 | 23,08 | 16,85 | DINAS SOSIAL | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | dibayarkan Pajaknya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 1 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 47,00 | Unit | 40.700.000 | 0 | 0 | 47,00 | 40.700.000 | 12,00 | 10.745.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 10.745.000 | 25,53 | 26 | 12,00 | 10.745.000 | 25,53 | 26,40 | DINAS SOSIAL | |
| | 0 | 0 | 1 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 164,00 | Kali | 56.050.000 | 0 | 0 | 164,00 | 56.050.000 | 30,00 | 14.585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 14.585.000 | 18,29 | 26 | 30,00 | 14.585.000 | 18,29 | 26,02 | DINAS SOSIAL | |
| | 0 | 0 | 1 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 3,00 | Unit | 100.000.000 | 0 | 0 | 3,00 | 100.000.000 | 3,00 | 98.217.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 98.217.000 | 100,00 | 98 | 3,00 | 98.217.000 | 100 | 98,22 | DINAS SOSIAL | |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47,17 | 55,64 | | | 47,17 | 55,64 | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Rendah | | | Sangat Rendah | Rendah | | |
| | 1 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 6 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 6 | 2 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 2 | 2.02 | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 2 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang | 2,00 | Dokumen | 7.000.000 | 0 | 0 | 2,00 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS SOSIAL | |
| | 1 | 6 | 2 | 2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 2 | 01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja | Jumlah orang mendapat | 25,00 | Orang | 16.900.000 | 0 | 0 | 25,00 | 16.900.000 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00 | 0 | 100,00 | 0 | 25,00 | 0 | 100 | 0 | DINAS SOSI | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AL | |
| | 1 | 6 | 2 | 02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota | 19,00 | TKSK | 261.600.000 | 0 | 0 | 19,00 | 261.600.000 | 0 | 6.980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.980.000 | 0,00 | 3 | 0 | 6.980.000 | 0 | 2,67 | DINAS SOSIAL | |
| | 1 | 6 | 2 | 04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota | 5,00 | Lembaga | 142.496.000 | 0 | 0 | 5,00 | 142.496.000 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 100,00 | 0 | 5,00 | 0 | 100 | 0 | DINAS SOSIAL | |
| | 1 | 6 | 2 | 05 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya | Jumlah Sertifikat yang dari | 5,00 | Sertifikat | 4.500.000 | 0 | 0 | 5,00 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS SOSI | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AL | |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 2,67 | | | 40 | 2,67 | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat | Sangat | | | Sangat | Sangat | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rendah | Rendah | | | Rendah | Rendah | | |
| 3 | 1 | 6 | 3 | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 3 | 2.01 | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 3 | 01 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota | 2,00 | Orang | 5.900.000 | 0 | 0 | 2,00 | 5.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS SOSIAL | |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat | Sangat | | | Sangat | Sangat | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rendah | Rendah | | | Rendah | Rendah | | |
| 4 | 1 | 6 | 4 | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 6 | 4 | 2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 4 | 01 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota | 374,00 | Orang | 55.000.000 | 0 | 0 | 374,00 | 55.000.000 | 200 | 47.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 47.740.000 | 53,48 | 87 | 200 | 47.740.000 | 53,48 | 86,80 | DINAS SOSIAL | |
| | 1 | 6 | 4 | 02 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan | 5,00 | Orang | 1.000.000 | 0 | 0 | 5,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS SOSIAL | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 4 | 03 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 2,00 | Orang | 13.000.000 | 0 | 0 | 2,00 | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelther | 0 | Unit | 13.000.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | DINAS SOSIAL | |
| | 1 | 6 | 4 | 04 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota | 2,00 | )rang | 1.000.000 | 0 | 0 | 2,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS SOSIAL | |
| | 1 | 6 | 4 | 05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki | 1,00 | Lokasi | 5.457.000.000 | 0 | 0 | 1,00 | 5.457.000.000 | 1,00 | 3.308.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 3.308.100.000 | 100,00 | 61 | 1,00 | 3.308.100.000 | 100 | 60,62 | DINAS SOSIAL | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | sesuai standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 6,00 | Kali | 5.457.000.000 | 0 | | 6,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota | 26,00 | Orang | 5.457.000.000 | 0 | | 26,00 | | 4,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4,00 | | 15,38 | | 4,00 | | 15,38 | | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan hidup layak | 2,2 | Orang | 5.457.000.000 | 0 | | 2,2 | | 2,2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2,2 | | 100,00 | | 2,2 | | 100 | | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan hidup layak | 0 | Orang | 5.457.000.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | DINAS SOSIAL | |
| | 1 | 6 | 4 | 06 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga | Jumlah Peserta Bimbingan | 15,00 | Orang | 20.000.000 | 0 | 0 | 15,00 | 20.000.000 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0 | 13,33 | 0 | 2,00 | 0 | 13,33 | 0 | DINAS SOSI | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AL | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota | 0 | Orang | 20.000.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | DINAS SOSIAL | |
| | 1 | 6 | 4 | 07 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk | 2,00 | Orang | 1.000.000 | 0 | 0 | 2,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS SOSIAL | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anak | Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 4 | 08 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar | 2,00 | Orang | 1.000.000 | 0 | 0 | 2,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS SOSIAL | |
| | 1 | 6 | 4 | 11 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan | 2,00 | Orang | 1.000.000 | 0 | 0 | 2,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS SOSIAL | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 4 | 12 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 35,00 | Orang | 24.000.000 | 0 | 0 | 35,00 | 24.000.000 | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 0 | 45,71 | 0 | 16,00 | 0 | 45,71 | 0 | DINAS SOSIAL | |
| | 1 | 6 | 4 | 2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIVAIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 4 | 02 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk | 0 | Tim | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 25,00 | Orang | 10.000.000 | 0 | | 25,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | DINAS SOSIAL | |
| | 1 | 6 | 4 | 06 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan | 5,00 | Paket | 1.000.000 | 0 | 0 | 5,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS SOSIAL | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,26 | 73,71 | | | 17,26 | 73,71 | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sedang | | | Sangat Rendah | Sedang | | |
| 5 | 1 | 6 | 5 | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 5 | 2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 5 | 01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | 60,00 | % | 208.750.000 | 0 | 0 | 60,00 | 208.750.000 | 0 | 15.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.200.000 | 0,00 | 7 | 0 | 15.200.000 | 0 | 7,28 | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam | 3,00 | Kali | 208.750.000 | 0 | | 3,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | DINAS SOSIAL | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | rangka menjaga kondusifitas daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata | 500 | Orang | 208.750.000 | 0 | | 500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | DINAS SOSIAL | |
| | 1 | 6 | 5 | 03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah pendamping PKH yang ditingkatkan kapasitasnya | 140,00 | SDM PKH | 15.925.919.500 | 0 | 0 | 140,00 | 15.925.919.500 | 0 | 1.935.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935.800.000 | 0,00 | 12 | 0 | 1.935.800.000 | 0 | 12,16 | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah KPM yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah | 5,5 | KPM | 15.925.919.500 | 0 | | 5,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah Mahasiswa miskin berprestasi yang mendapat bantuan | 600 | Orang | 15.925.919.500 | 0 | | 600 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam | 3,00 | Kali | 15.925.919.500 | 0 | | 3,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | DINAS SOSIAL | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | rangka menjaga kondusifitas daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota | 43 | Keluarga | 15.925.919.500 | 0 | | 43 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai bagi buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok | 3.628,00 | Orang | 15.925.919.500 | 0 | | 3.628,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | DINAS SOSIAL | |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 9,72 | | | 0 | 9,72 | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah | | | Sangat<br>Rendah | Sangat<br>Rendah | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 6 | 6 | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 6 | 2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 6 | 01 | Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota | 1,00 | Kampung | 10.730.500 | 0 | 0 | 1,00 | 10.730.500 | 1,00 | 6.662.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 6.662.000 | 100,00 | 62 | 1,00 | 6.662.000 | 100 | 62,08 | DINAS SOSIAL | |
| | 1 | 6 | 6 | 02 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 35,00 | Orang | 179.312.000 | 0 | 0 | 35,00 | 179.312.000 | 35,00 | 32.572.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,00 | 32.572.000 | 100,00 | 18 | 35,00 | 32.572.000 | 100 | 18,16 | DINAS SOSIAL | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kewenangan Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 6 | 2 .0 1 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 6 | 0 1 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota | 100 | Orang | 38.311.726 | 0 | 0 | 100 | 38.311.726 | 285 ,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 ,00 | 0 | 285, 00 | 0 | 285 ,00 | 0 | 285 | 0 | DINAS SOSIAL | |
| | 1 | 6 | 6 | 0 2 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca | 10,0 0 | Orang | 11.004.500 | 0 | 0 | 10,0 0 | 11.004.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS SOSIAL | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 6 | 03 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota | 6,00 | Unit | 7.200.000 | 0 | 0 | 6,00 | 7.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINAS SOSIAL | |
| | 1 | 6 | 6 | 04 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 500 | Orang | 7.725.000 | 0 | 0 | 500 | 7.725.000 | 174,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,00 | 0 | 34,80 | 0 | 174,00 | 0 | 34,80 | 0 | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah Orang terlantar yang mendapatkan bantuan | 0 | Orang | 7.725.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah orang yang difasilitasi dalam pemberian bantuan santunan kematian | 0 | Ahli Waris | 7.725.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | DINAS SOSIAL | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 6 | 6 | 05 | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota | 40,00 | Orang | 40.420.000 | 0 | 0 | 40,00 | 40.420.000 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0 | 5,00 | 0 | 2,00 | 0 | 5 | 0 | DINAS SOSIAL | |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,31 | 40,12 | | | 58,31 | 40,12 | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah | | | Rendah | Sangat Rendah | | |
| 7 | 1 | 6 | 7 | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 7 | 2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 7 | 02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota | Jumlah pembayaran tenaga kebersihan TMP | 24,00 | Kali | 39.504.000 | 0 | 0 | 24,00 | 39.504.000 | 4,00 | 6.825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 6.825.000 | 16,67 | 17 | 4,00 | 6.825.000 | 16,67 | 17,28 | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah pemeliharaan TMP | 2,00 | Kali | 39.504.000 | 0 | | 2,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | DINAS SOSI | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | dalam setahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AL | |
| | | | | | | Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota | 213,00 | Makam | 39.504.000 | 0 | | 213,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | DINAS SOSIAL | |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,56 | 17,28 | | | 5,56 | 17,28 | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat | Sangat | | | Sangat | Sangat | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rendah | Rendah | | | Rendah | Rendah | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,04 | 28,45 | | | 24,04 | 28,45 | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat | Sangat | | | Sangat | Sangat | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rendah | Rendah | | | Rendah | Rendah | | |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Triwulan Berikutnya : - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Renja PD Berikutnya : - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Ngawi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Tipe A maka Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris
   - Sub Bagian Umum;
   - Sub Bagian Keuangan dan ;
c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
d. Bidang Rehabilitasi Sosial
e. Bidang Pemberdayaan Sosial
f. Bidang Penanganan Bencana dan Migran
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial Tipe A.

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Kegiatan yang diselenggarakan adalah melaksanakan kewenangan Desentralisasi di Bidang Sosial dan tugas lain yang diberikan Bupati, yang sepenuhnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ngawi melalui Sekretaris Daerah kabupaten Ngawi.

Berikut adalah gambaran pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Ngawi

| No | Indikator | SPM/ Standart Nasional | IKK | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | | | 81,45 | 89,40 | 89,45 | 89,50 | 89,35 | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 89,45 | 89,50 | |
| 2 | Persentase PPKS yang meningkat derajat kesejahteraannya | | | 85% | 90% | 95% | 100% | 88% | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 95% | 100% | |
| 3 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Skala Kab/ Kota | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 100% | 100% | |
| 4 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 100% | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 100% | 100% | |
| 6 | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 100% | 100% | |
| 7 | Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap dadurat bencana bagi Korban Bencana Kota | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 100% | 100% | |
| 8 | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | | √ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 100% | 100% | |
| 9 | Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki | | √ | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi | |
| 10 | Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM | | √ | 58.523 jiwa | 58.523 jiwa | 58.523 jiwa | 58.523 jiwa | 58.523 jiwa | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 58.523 jiwa | 58.523 jiwa | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk | | √ | 1 Tim | 1 Tim | 1 Tim | 1 Tim | 1 Tim | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 1 Tim | 1 Tim | |
| 12 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau | | √ | 7870 Orang | 7870 Orang | 7870 Orang | 7870 Orang | 2521 Orang | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 7870 Orang | 7870 Orang | |
| 13 | Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki | | √ | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 2 Unit | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 2 Unit | 2 Unit | |
| 14 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi | | √ | 6482 Orang | 6482 Orang | 6482 Orang | 6482 Orang | 150 Orang | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 6482 Orang | 6482 Orang | |
| 15 | Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar | | √ | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 1 Unit | 1 Unit | |
| 16 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang | | √ | 27 Orang | 27 Orang | 27 Orang | 27 Orang | 0 | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 27 Orang | 27 Orang | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu | | √ | 81 Orang | 81 Orang | 81 Orang | 81 Orang | 7 Orang | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 81 Orang | 81 Orang | |
| 18 | Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter | | √ | 6 Unit | 6 Unit | 6 Unit | 6 Unit | 6 Unit | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 6 Unit | 6 Unit | |
| 19 | Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia | | √ | 27 Orang | 27 Orang | 27 Orang | 27 Orang | NA | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 27 Orang | 27 Orang | |
| 20 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan | | √ | 27 Orang | 27 Orang | 27 Orang | 27 Orang | NA | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 27 Orang | 27 Orang | |
| 21 | Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah | | √ | 1 Orang | 1 Orang | 1 Orang | 1 Orang | NA | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 1 Orang | 1 Orang | |
| 22 | Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan | | √ | 383 Orang | 383 Orang | 383 Orang | 383 Orang | 449 Orang | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 449 Orang | 449 Orang | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial | | √ | 117 Orang | 117 Orang | 117 Orang | 117 Orang | 20 Orang | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 117 Orang | 117 Orang | |
| 24 | Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat | | √ | 1048 Orang | 1048 Orang | 1048 Orang | 1048 Orang | 33 Orang | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 1048 Orang | 1048 Orang | |
| 25 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan | | √ | 2 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 0 | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 2 Orang | 2 Orang | |
| 26 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar | | √ | 10 Orang | 10 Orang | 10 Orang | 10 Orang | 0 | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 10 Orang | 10 Orang | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga | | √ | 2 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 0 | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 2 Orang | 2 Orang | |
| 28 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga | | √ | 60 Orang | 60 Orang | 60 Orang | 60 Orang | 0 | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 60 Orang | 60 Orang | |
| 29 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk | | √ | 82 Orang | 82 Orang | 82 Orang | 82 Orang | 89 Orang | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 82 Orang | 82 Orang | |
| 30 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | | √ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 100% | 100% | |
| 31 | Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan | | √ | 59 Orang | 59 Orang | 59 Orang | 59 Orang | 56 Orang | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 100 Orang | 100 Orang | |
| 32 | Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang | | √ | 6 Orang | 6 Orang | 6 Orang | 6 Orang | 0 | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 10 Orang | 10 Orang | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki | | √ | 12 Unit | 12 Unit | 12 Unit | 12 Unit | 10 Unit | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 12 Unit | 12 Unit | |
| 34 | Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial | | √ | 59 Orang | 59 Orang | 59 Orang | 59 Orang | 272 Orang | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 59 Orang | 59 Orang | |
| 35 | Jumlah pekerja sosial professional / tenaga kesejahteraansosial dan / atau relawan sosial yang tersedia | | √ | 35 Orang | 35 Orang | 35 Orang | 35 Orang | 449 Orang | Dihitung pada akhir Tahun 2024 | 449 Orang | 449 Orang | |

2.3 Isu-Isu

Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi pada Tahun 2023 tergolong sangat baik, realisasi dari target tersebut mencapai angka 98,39%. Ketercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ngawi tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

a. Masih terdapat siswa miskin yang berprestasi namun tidak bisa melanjutkan pendidikan.
b. Masih banyaknya PPKS yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.
c. Tingginya jumlah balita dan anak terlantar yang belum mendapatkan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, tempat tinggal).
d. Penyandang disabilitas yang belum mendapatkan akses layanan dasar masih tinggi.
e. Lansia terlantar yang belum mendapatkan akses layanan dasar masih tinggi.
f. Tuna sosial terlantar yang belum mendapatkan akses layanan dasar masih tinggi.
g. Masih adanya Warga Negara Migran Bermasalah Sosial (PMBS).

Dinas Sosial Kabupaten Ngawi berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang akan lebih baik, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut:

a. Komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Ngawi terhadap penanganan permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan masuknya pelayanan sosial sebagai salah satu Misi dari Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu priortitas daerah sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk penanganan kesejahteraan sosial.
b. Dukungan dari para *stakeholders* (dunia usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial, dll) terkait penanggulangan

permasalahan sosial di masyarakat begitu tinggi, hanya belum terkoordinir dengan baik.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026. Rencana Kerja selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi, juga memuat usulan- usulan hasil musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 bahwa Dinas Sosial bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah yakni penanggulangan kemiskinan dimana pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut telah ditentukan besaran anggaran Pagu Indikatif untuk Dinas Sosial yaitu sebesar Rp. 21.544.981.677,00.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2025 dalam hal ini yang mendukung prioritas dan disesuaikan kemampuan pendanaan Pemerintah Kabupaten Ngawi, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel 2.4.

Tabel Bab 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Ngawi

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 24.666.190.340,29 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 21.544.981.677,00 | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | 5.491.682.840,29 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | 5.116.082.677,00 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Sosial | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu | 100% | 55.000.000,00 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Sosial | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu | 100% | 35.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 dokumen | 50.000.000,00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 dokumen | 18.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | 1.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | 3.900.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 dokumen | 1.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 dokumen | 7.310.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 dokumen | 1.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 dokumen | 1.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 4 dokumen | 1.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 4 dokumen | 1.600.000,00 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 laporan | 1.000.000,00 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 laporan | 3.190.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dinas Sosial | Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 100% | 3.907.251.840,29 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dinas Sosial | Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu | 100% | 4.149.519.607,00 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun | 26 dokumen | 3.897.251.840,29 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun | 26 dokumen | 4.140.519.607,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 936 Orang/ bulan | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 936 Orang/ bulan | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan | 5.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan | 8.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan Semesteran SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 50 laporan | 5.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan Semesteran SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 50 laporan | 1.000.000,00 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dinas Sosial | Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun | 100% | 171.100.000,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dinas Sosial | Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun | 100% | 72.973.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 4 paket | 40.000.000,00 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 4 paket | 22.973.000 | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 42 orang | 131.100.000,00 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 42 orang | 50.000.000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dinas Sosial | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun | 100% | 335.000.000,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dinas Sosial | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun | 100% | 266.948.600,00 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 10.000.000,00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 9.000.000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 paket | 60.000.000,00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 paket | 60.515.000 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 paket | 42.000.000,00 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 paket | 13.885.100 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah barang yang digandakan | 27000 lembar | 90.000.000,00 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah barang yang digandakan | 27000 lembar | 25.256.000 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 paket | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 paket | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 132 dokumen | 16.000.000,00 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 132 dokumen | 16.000.000,00 | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8 laporan | 10.000.000,00 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8 laporan | 4.185.000,00 | |
| | | | Jumlah mamin kunjungan tamu yang disediakan | 200 kotak | | | | Jumlah mamin kunjungan tamu yang disediakan | 200 kotak | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 140 laporan | 107.000.000,00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 140 laporan | 138.107.500,00 | |
| | | | Jumlah mamin rapat SKPD yang disediakan | 365 kotak | | | | Jumlah mamin rapat SKPD yang disediakan | 365 kotak | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Sosial | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun | 100 | 161.500.000,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun | 100 | 76.705.730,00 | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 unit | 22.000.000,00 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 unit | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 unit | 22.000.000,00 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 unit | - | |
| | Pengadaan Mebel | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 20 unit | 10.000.000,00 | Pengadaan Mebel | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 20 unit | - | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 unit | 45.000.000,00 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 unit | 76.705.730,00 | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 unit | 12.500.000,00 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 unit | - | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 unit | 50.000.000,00 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 unit | - | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dinas Sosial | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | 293.000.000,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | 283.185.740,00 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 144 laporan | 100.000.000,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 144 laporan | 126.665.740,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik | 50 kali | | | | Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik | 50 kali | | |
| 4 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 60 Laporan | 73.000.000,00 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 60 Laporan | 63.600.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 84 Laporan | 120.000.000,00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 84 Laporan | 92.920.000,00 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dinas Sosial | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun | 100% | 568.831.000,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun | 100% | 231.750.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 13 unit | 31.500.000,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 13 unit | 55.750.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 47 unit | 70.900.000,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 47 unit | 50.000.000 | |
| | Pemeliharaan Mebel | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 15 kali | 3.000.000,00 | Pemeliharaan Mebel | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 15 kali | - | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 164 kali | 28.200.000,00 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 164 kali | 51.000.000 | |
| | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 3 unit | 435.231.000,00 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 3 unit | 75.000.000 | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | Persentase PSKS Aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial | 65% | 1.726.294.500,00 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | Persentase PSKS Aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial | 65% | 738.000.000,00 | |
| | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Kabupaten Ngawi | Persentase tindak lanjut Forum tanggung jawab sosial | 100% | 40.000.000,00 | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Kabupaten Ngawi | Persentase tindak lanjut Forum tanggung jawab sosial | 100% | 5.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang | 10 dokumen | 40.000.000,00 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang | 10 dokumen | 5.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota | Kabupaten Ngawi | Jumlah PSKS menerima peningkatan kapasitas | 189 PSKS | 1.686.294.500,00 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota | Kabupaten Ngawi | Jumlah PSKS menerima peningkatan kapasitas | 189 PSKS | 733.000.000,00 | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | | Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | 60 orang | 500.000.000,00 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | | Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | 60 orang | 12.000.000,00 | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota | | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 19 TKSK | 336.294.500,00 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota | | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 19 TKSK | 238.000.000,00 | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota | 5 Lembaga | 800.000.000,00 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota | 5 Lembaga | 478.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota | 10 sertifikat | 50.000.000,00 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota | 10 sertifikat | 5.000.000,00 | |
| | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani | 100% | 50.000.000,00 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani | 100% | 5.900.000,00 | |
| | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal | Kabupaten Ngawi | Persentase pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan | 100% | 50.000.000,00 | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal | Kabupaten Ngawi | Persentase pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan | 100% | 5.900.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal | | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota | 10 Orang | 50.000.000,00 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal | | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota | 10 Orang | 5.900.000,00 | |
| | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | Persentase PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | 65% | 2.506.600.000,00 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | Persentase PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | 65% | 5.413.900.000,00 | |
| 6 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Kabupaten Ngawi | Jumlah PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | 1237 orang | 2.347.045.000,00 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Kabupaten Ngawi | Jumlah PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | 1237 orang | 5.390.600.000,00 | |
| | Penyediaan Permakanan | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 305 orang | 518.803.000,00 | Penyediaan Permakanan | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 305 orang | 56.700.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Sandang | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota | 30 orang | 10.735.000,00 | Penyediaan Sandang | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota | 30 orang | 3.000.000 | |
| | Penyediaan Alat Bantu | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 75 orang | 241.358.500,00 | Penyediaan Alat Bantu | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 75 orang | 14.000.000 | |
| | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota | 30 orang | 100.000.000,00 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota | 30 orang | 2.500.000 | |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar | 1 lokasi | 1.219.234.500,00 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar | 1 lokasi | 5.267.400.000 | |
| | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 8 kali | | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 8 kali | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota | 150 orang | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota | 150 orang | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 70 orang | 55.975.000,00 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 70 orang | 15.000.000,00 | |
| | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 orang | 24.600.000,00 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 orang | 3.000.000,00 | |
| | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar | 15 orang | 24.600.000,00 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar | 15 orang | 3.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 orang | 50.000.000,00 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 orang | 3.000.000,00 | |
| | Pemberian Layanan Rujukan | | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 120 orang | 101.739.000,00 | Pemberian Layanan Rujukan | | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 120 orang | 23.000.000,00 | |
| | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV AIDS dan Napza di luar Panti Sosial | Kabupaten Ngawi | Jumlah PPKS lainnya mendapat pelayanan rehabilitasi sosial | 70 orang | 159.555.000,00 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV AIDS dan Napza di luar Panti Sosial | Kabupaten Ngawi | Jumlah PPKS lainnya mendapat pelayanan rehabilitasi sosial | 70 orang | 23.300.000,00 | |
| | Pemberian Layanan Kedaruratan | | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk | 1 tim | 65.238.000,00 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk | 1 tim | 20.300.000 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 50 orang | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 50 orang | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 orang | 24.880.000,00 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 orang | 3.000.000 | |
| | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 orang | 20.800.000,00 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 orang | - | |
| | Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 10 dokumen | 48.637.000,00 | Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 10 dokumen | - | |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | Persentase desa yang berperan aktif dalam verifikasi dan validasi DTKS | 65% | 13.834.663.000,00 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | Persentase desa yang berperan aktif dalam verifikasi dan validasi DTKS | 65% | 9.749.999.000,00 | |
| | | | Persentase PPKS yang Mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | 95% | | | | Persentase PPKS yang Mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | 95% | | |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Kabupaten Ngawi | Jumlah data fakmis yang up to date | 1 data | 13.834.663.000,00 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Kabupaten Ngawi | Jumlah data fakmis yang up to date | 1 data | 9.749.999.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan perlindungan dan jaminan sosial | 504.110 Orang | | | | Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan perlindungan dan jaminan sosial | 504.110 Orang | | |
| | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | | Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | 65% | 600.000.000,00 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | | Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | 65% | 357.400.000 | |
| | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 4 kali | | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 4 kali | | |
| | | | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 500.000 orang | | | | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 500.000 orang | | |
| | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | Jumlah pendamping PKH yang ditingkatkan kapasitasnya | 150 SDM PKH | 12.794.663.000,00 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | Jumlah pendamping PKH yang ditingkatkan kapasitasnya | 150 SDM PKH | 9.392.599.000 | |
| | | | Jumlah KPM yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah | 5.500 KPM | | | | Jumlah KPM yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah | 5.500 KPM | | |
| | | | Jumlah Mahasiswa miskin berprestasi yang mendapat bantuan | 75 orang | | | | Jumlah Mahasiswa miskin berprestasi yang mendapat bantuan | 75 orang | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 4 kali | | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | 4 kali | | |
| | | | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 43.000 Keluarga | | | | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 43.000 Keluarga | | |
| | | | Jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai bagi buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok | 2500 Orang | | | | Jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai bagi buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok | 2500 Orang | | |
| | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 125 orang | 440.000.000,00 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 125 orang | - | |
| | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | Persentase penanganan bencana | 100% | 856.950.000,00 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | Persentase penanganan bencana | 100% | 382.100.000,00 | |
| | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota | Kabupaten Ngawi | Persentase korban bencana mendapatkan bantuan | 100% | 596.950.000,00 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota | Kabupaten Ngawi | Persentase korban bencana mendapatkan bantuan | 100% | 157.500.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Makanan | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 1500 orang | 481.950.000,00 | Penyediaan Makanan | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 1500 orang | 50.000.000 | |
| | Penyediaan Sandang | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 600 orang | 25.000.000,00 | Penyediaan Sandang | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 600 orang | 20.000.000 | |
| | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Unit | 25.000.000,00 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Unit | 20.000.000 | |
| | Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 orang | 40.000.000,00 | Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 orang | 29.500.000 | |
| | Pelayanan Dukungan Psikososial | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 orang | 25.000.000,00 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 orang | 38.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota | Kabupaten Ngawi | Jumlah Taruna Siaga Bencana yang menerima peningkatan kemampuan | 40 orang | 260.000.000,00 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota | Kabupaten Ngawi | Jumlah Taruna Siaga Bencana yang menerima peningkatan kemampuan | 40 orang | 224.600.000,00 | |
| | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Kampung | 60.000.000,00 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Kampung | 19.742.000 | |
| | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 102 Orang | 200.000.000,00 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 102 Orang | 204.858.000 | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | Cakupan Taman Makam Pahlawan yang dikelola | 100% | 200.000.000,00 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | Cakupan Taman Makam Pahlawan yang dikelola | 100% | 139.000.000,00 | |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota | Kabupaten Ngawi | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola | 1 TMP | 200.000.000,00 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota | Kabupaten Ngawi | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola | 1 TMP | 139.000.000,00 | |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota | | Jumlah pembayaran tenaga kebersihan TMP | 24 kali | 200.000.000,00 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota | | Jumlah pembayaran tenaga kebersihan TMP | 24 kali | 139.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah pemeliharaan TMP dalam setahun | 2 kali | | | | Jumlah pemeliharaan TMP dalam setahun | 2 kali | | |
| | | | Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota | 201 makam | | | | Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota | 201 makam | | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat. Usulan tersebut saat ini diakomodir melalui *aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang diampu oleh Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Bab 2.5
Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Ngawi

Nama SKPD : Dinas Sosial

| No | Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Penyediaan Alat Bantu | Dusun Manggis RT. 004 RW. 004 Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 1 Unit | |
| 2 | Penyediaan Alat Bantu | Dusun Manggis RT. 004 RW. 004 Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 1 Unit | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | Karang Taruna Gama Jl. Brawijaya No. 29 | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Paket | |
| 4 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | Karang Taruna Dusun Wareng JL. Wareng No, 21 Ds. Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngaw | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Paket | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | Karang Taruna Tunas Yodha Pratama Dusun Karangrejo Jl. Kutilang Ds. Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngaw | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Paket | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | Pokmas Bahagia Abadi Desa Klampisan RT. 06 RW. 06 Kab. Ngawi | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Paket | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaa | Sinoman Egoh Taruno Desa Sidorejo RT. 03 RW. 01 Kec. | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan | 1 Paket | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | n Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | Geneng | Kabupaten/Kota | | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | Pokmas Carat sejahtera Desa Patalan RT. 01 RW. 04 Kab. Ngawi | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Paket | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | Karang Taruna Brajamuda Dusun Brangol Desa Grudo Kec. Ngawi | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Paket | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | Pokmas Rahayu Permai Perum Griya Rahayu Kec. Ngawi | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Paket | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | Yayasan Al Mubarok Desa Tempursari Barat desa Tambakboyo Kec. mantingan | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Paket | |

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mendukung pencapaian Program Prioritas Nasional Tahun 2025, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk mewujdukan keterkaitan dan keselarasan dalam pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten Ngawi, sehingga terjadi pembangunan daerah yang sinergi dan optimal. Berikut ini adalah keselarasan tema RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2025. Keselarasan Arah Kebijakan Prioritas RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan RKPD dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Keselarasan Arah Kebijakan Prioritas RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2025

| No | Program Prioritas Nasional Tahun 2025 | Program Prioritas Provinsi | Program Prioritas Kab. Ngawi |
|---|---|---|---|
| 1 | Membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan | Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial | Penurunan kemiskinan melalui penanganan yang tepat sasaran |

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penanganan masalah kesejahteraan sosial

2. Meningkatnya Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Sasaran Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi adalah :

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya pelayanan dasar sosial bagi PPKS;

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |
| 1 | Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah | | | Nilai LHE AKIP | 89,45 | 89,50 |
| | | | Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | | |
| 2 | Meningkatnya Cakupan Penanganan PPKS | Persentase PPKS yang mandiri | | | 0,50% | 0,50% |
| | | | Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS | Persentase PPKS yang meningkat derajat kesejahteraannya | 95% | 100% |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mengampu visi Bupati Ngawi terplilih “SEMESTA BERENCANA, Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlaq, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI “.
Dinas Sosial juga mengampu misi 2 Bupati Ngawi terpilih yaitu Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi. Rumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam Rencana Kerja Tahun 2025 diharapkan dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian sasaran, target dan indikator SDGs sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitasnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada publik. Pelayanan Dasar sendiri merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Bentuk Pelayanan Dasar untuk Standar Pelayanan Minimal terdiri atas berbagai jenis, salah satunya melalui sosial atau disebut Standar Pelayanan Minimal sosial. Standar Pelayanan Minimal sosial mencangkup atas Daerah Otonom atau disebut juga dengan Daerah yaitu SPM sosial daerah provinsi dan Standar Pelayanan Minimal sosial Daerah kabupaten/kota.

Untuk jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sosial Daerah provinsi dan Standar Pelayanan Minimal sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan pengemis di dalam panti. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam proses penyusunan anggaran, Dinas Sosial mengalami penyesuaian anggaran daerah dan rumusan prioritas daerah sehingga ada beberapa sub kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan ketercapaian target indikator kinerja sebagai tolok ukur, maka Dinas Sosial Kabupaten Ngawi menetapkan 7 program, 16 kegiatan dan 55 sub kegiatan. Namun hal ini tidak berdampak langsung dalam capaian indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Ngawi. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi adalah sebagaimana tabel 4.1 pada halaman berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2025

dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Ngawi

Nama PD : Dinas Sosial

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 21.544.981.677,00 | | | | 25.373.951.736,72 |
| 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | | 100% | 5.116.082.677,00 | | | | 5.286.944.236,72 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu | Dinas Sosial | 100% | 35.000.000,00 | | | 100% | 55.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 12 dokumen | 18.000.000,00 | Pendapatan Asli Daerah | - | 12 dokumen | 50.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 1 dokumen | 3.900.000,00 | Pendapatan Asli Daerah | - | 1 dokumen | 1.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | 2 dokumen | 7.310.000,00 | Pendapatan Asli Daerah | - | 2 dokumen | 1.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | 2 dokumen | 1.000.000,00 | Pendapatan Asli Daerah | - | 2 dokumen | 1.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | 4 dokumen | 1.600.000,00 | Pendapatan Asli Daerah | - | 4 dokumen | 1.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 7 laporan | 3.190.000,00 | Pendapatan Asli Daerah | - | 7 laporan | 1.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu | Dinas Sosial | 100% | 4.149.519.607,00 | | | 100% | 3.946.223.236,72 |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun | | 26 dokumen | 4.140.519.607,00 | Pendapatan Transfer | - | 26 dokumen | 3.936.223.236,72 |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 936 Orang/ bulan | | | - | 936 Orang/ bulan | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan | | 1 laporan | 8.000.000,00 | Pendapatan Asli Daerah | - | 1 laporan | 5.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Akhir Tahun SKPD | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | 50 laporan | 1.000.000,00 | Pendapatan Asli Daerah | - | 50 laporan | 5.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun | Dinas Sosial | 100% | 72.973.000,00 | - | - | 100% | 181.100.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | 4 paket | 22.973.000 | Pendapatan Asli Daerah | - | 4 Paket | 50.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.05 | 000011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | 42 orang | 50.000.000 | Pendapatan Asli Daerah | - | 42 orang | 131.100.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun | Dinas Sosial | 100% | 266.948.600,00 | - | - | 100% | 339.521.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | 1 Paket | 9.000.000 | Pendapatan Asli Daerah | - | 1 Paket | 10.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 2 paket | 60.515.000 | Pendapatan Asli Daerah | - | 2 paket | 60.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | 4 paket | 13.885.100 | Pendapatan Asli Daerah | - | 4 paket | 42.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang yang digandakan | | 27000 lembar | 25.256.000 | Pendapatan Asli Daerah | - | 29000 lembar | |
| | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | 2 paket | | | - | 2 paket | 90.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | 132 dokumen | 16.000.000,00 | Pendapatan Asli Daerah | - | 132 dokumen | 16.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | 8 laporan | 4.185.000,00 | Pendapatan Asli Daerah | - | 8 laporan | 10.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah mamin kunjungan tamu yang disediakan | | 200 kotak | | | - | 200 kotak | - |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 140 laporan | 138.107.500,00 | Pendapatan Asli Daerah | | 140 laporan | 111.521.000,00 |
| | | | | | | Jumlah mamin rapat SKPD yang disediakan | | 365 kotak | | | - | 365 kotak | |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun | Dinas Sosial | 100 | 76.705.730,00 | | - | 100 | 113.500.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | 1 unit | - | Pendapatan Asli Daerah | - | 1 unit | 25.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | 2 unit | - | Pendapatan Asli Daerah | | 1 unit | 20.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | 20 unit | - | Pendapatan Asli Daerah | - | 22 unit | 10.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | 4 unit | 76.705.730,00 | Pendapatan Asli Daerah | - | 4 unit | 25.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | 3 unit | - | Pendapatan Asli Daerah | | 3 unit | 8.500.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | 2 unit | - | Pendapatan Asli Daerah | - | 2 unit | 25.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | Dinas Sosial | 100% | 283.185.740,00 | - | - | 100% | 293.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 144 laporan | 126.665.740,00 | Pendapatan Asli Daerah | | 144 laporan | 100.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik | | 50 kali | | | | 55 kali | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 60 Laporan | 63.600.000,00 | Pendapatan Asli Daerah | - | 60 Laporan | 73.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 84 Laporan | 92.920.000,00 | Pendapatan Asli Daerah | | 84 Laporan | 120.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun | Dinas Sosial | 100% | 231.750.000,00 | - | - | 100% | 358.600.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | 13 unit | 55.750.000 | Pendapatan Asli Daerah | - | 13 unit | 31.500.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | 47 unit | 50.000.000 | Pendapatan Asli Daerah | | 47 unit | 70.900.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | 15 kali | - | Pendapatan Asli Daerah | | 15 kali | 3.000.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 164 kali | 51.000.000 | Pendapatan Asli Daerah | | 164 kali | 28.200.000,00 |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | | 3 unit | 75.000.000 | Pendapatan Asli Daerah | - | 3 unit | 225.000.000,00 |
| 1 | 06 | 02 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS Aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial | | 65% | 738.000.000,00 | | | 70% | 2.043.294.500,00 |
| 1 | 06 | 02 | 2.02 | | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase tindak lanjut Forum tanggung jawab sosial | Kabupaten Ngawi | 100% | 5.000.000,00 | - | - | 100% | 50.000.000,00 |
| 1 | 06 | 02 | 2.02 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang | | 10 dokumen | 5.000.000,00 | Pendapatan Transfer | - | 10 dokumen | 50.000.000,00 |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah PSKS menerima peningkatan kapasitas | Kabupaten Ngawi | 189 PSKS | 733.000.000,00 | - | - | 214 PSKS | 1.993.294.500,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | | 60 orang | 12.000.000,00 | Pendapatan Transfer | - | 60 orang | 543.294.500,00 |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | 19 TKSK | 238.000.000,00 | Pendapatan Transfer | | 19 TKSK | 475.000.000,00 |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota | | 5 Lembaga | 478.000.000,00 | Pendapatan Transfer | - | 5 Lembaga | 900.000.000,00 |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0005 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota | | 10 sertifikat | 5.000.000,00 | Pendapatan Transfer | | 10 sertifikat | 75.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 03 | | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani | | 100% | 5.900.000,00 | - | | 100% | 50.000.000,00 |
| 1 | 06 | 03 | 2.01 | | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal | Persentase pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan | Kabupaten Ngawi | 100% | 5.900.000,00 | - | | 100% | 50.000.000,00 |
| 1 | 06 | 03 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota | | 10 Orang | 5.900.000,00 | Pendapatan Transfer | | 10 Orang | 50.000.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | | 65% | 5.413.900.000,00 | - | - | 70% | 2.762.100.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah PPKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial | Kabupaten Ngawi | 1237 orang | 5.390.600.000,00 | - | - | 1327 Orang | 2.592.545.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | | 305 orang | 56.700.000 | Pendapatan Transfer | | 365 orang | 687.897.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota | | 30 orang | 3.000.000 | Pendapatan Transfer | | 30 orang | 10.735.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota | | 75 orang | 14.000.000 | Pendapatan Transfer | | 85 orang | 266.358.500,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota | | 30 orang | 2.500.000 | Pendapatan Transfer | | 30 orang | 100.000.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar | | 1 lokasi | 5.267.400.000 | Pendapatan Transfer | | 1 lokasi | 1.249.234.500,00 |
| | | | | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | | 8 kali | | | | 8 kali | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota | | 150 orang | | | | 150 orang | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | 70 orang | 15.000.000,00 | Pendapatan Transfer | | 72 orang | 60.975.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0007 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | | 15 orang | 3.000.000,00 | Pendapatan Transfer | | 20 orang | 30.600.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar | | 15 orang | 3.000.000,00 | Pendapatan Transfer | | 20 orang | 30.600.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | 12 orang | 3.000.000,00 | Pendapatan Transfer | | 12 orang | 50.000.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0012 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota | | 120 orang | 23.000.000,00 | Pendapatan Transfer | | 125 orang | 106.145.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV AIDS dan Napza di luar Panti Sosial | Jumlah PPKS lainnya mendapat pelayanan rehabilitasi sosial | Kabupaten Ngawi | 70 orang | 23.300.000,00 | - | - | 80 Orang | 169.555.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0002 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk | | 1 tim | 20.300.000 | Pendapatan Transfer | | 1 tim | 75.238.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota | | 50 orang | | | | 50 orang | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0006 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | | 12 orang | 3.000.000 | Pendapatan Transfer | | 50 orang | 30.880.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | 12 orang | - | Pendapatan Transfer | | 12 orang | 20.800.000,00 |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0014 | Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | | 10 dokumen | - | Pendapatan Transfer | | 10 dokumen | 42.637.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 05 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase desa yang berperan aktif dalam verifikasi dan validasi DTKS | | 65% | 9.749.999.000,00 | - | - | 70% | 14.074.663.000,00 |
| | | | | | | Persentase PPKS yang Mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | | 95% | | | | 100% | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah data fakmis yang up to date | Kabupaten Ngawi | 1 data | 9.749.999.000,00 | - | - | 1 data | 14.074.663.000,00 |
| | | | | | | Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan perlindungan dan jaminan sosial | | 504.110 Orang | | | | 530.643 Orang | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | | 65% | 357.400.000 | Pendapatan Transfer | | 70% | 650.000.000,00 |
| | | | | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | | 4 kali | | | | 4 kali | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | | 500.000 orang | | | | 500.000 orang | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah pendamping PKH yang ditingkatkan kapasitasnya | | 150 SDM PKH | 9.392.599.000 | Pendapatan Transfer | | 150 SDM PKH | 12.949.663.000,00 |
| | | | | | | Jumlah KPM yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah | | 5.500 KPM | | | | 5.500 KPM | |
| | | | | | | Jumlah Mahasiswa miskin berprestasi yang mendapat bantuan | | 75 orang | | | | 75 orang | |
| | | | | | | Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam rangka menjaga kondusifitas daerah | | 4 kali | | | | 4 kali | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | 43.000 Keluarga | | | | 43.000 Keluarga | |
| | | | | | | penerima Bantuan Langsung Tunai bagi buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok | | 2500 Orang | | | | 2500 Orang | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | 125 orang | - | Pendapatan Transfer | | 125 orang | 475.000.000,00 |
| 1 | 06 | 06 | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase penanganan bencana | | 100% | 382.100.000,00 | - | - | 100% | 1.056.950.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota | Persentase korban bencana mendapatkan bantuan | Kabupaten Ngawi | 100% | 157.500.000,00 | - | - | 100% | 731.950.000,00 |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | | 1500 orang | 50.000.000 | Pendapatan Transfer | | 1500 orang | 606.950.000,00 |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | 600 orang | 20.000.000 | Pendapatan Transfer | | 600 orang | 25.000.000,00 |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | | 2 Unit | 20.000.000 | Pendapatan Transfer | | 2 Unit | 25.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0004 | Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | | 100 orang | 29.500.000 | Pendapatan Transfer | | 100 orang | 50.000.000,00 |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | | 100 orang | 38.000.000 | Pendapatan Transfer | | 100 orang | 25.000.000,00 |
| 1 | 06 | 06 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota | Jumlah Taruna Siaga Bencana yang menerima peningkatan kemampuan | Kabupaten Ngawi | 40 orang | 224.600.000,00 | - | - | 40 orang | 325.000.000,00 |
| 1 | 06 | 06 | 2.02 | 0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | 1 Kampung | 19.742.000 | Pendapatan Transfer | | 1 lembaga | 60.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 06 | 2.02 | 0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | 102 Orang | 204.858.000 | Pendapatan Transfer | | 55% | 265.000.000,00 |
| 1 | 06 | 07 | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Cakupan Taman Makam Pahlawan yang dikelola | | 100% | 139.000.000,00 | - | - | 100% | 100.000.000,00 |
| 1 | 06 | 07 | 2.01 | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola | Kabupaten Ngawi | 1 TMP | 139.000.000,00 | - | - | 1 TMP | 100.000.000,00 |
| 1 | 06 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota | Jumlah pembayaran tenaga kebersihan TMP | | 24 kali | 139.000.000,00 | Pendapatan Transfer | | 24 kali | 100.000.000,00 |
| | | | | | | Jumlah pemeliharaan TMP dalam setahun | | 2 kali | | | | 2 kali | |
| | | | | | | Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota | | 201 makam | | | | 201 makam | |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan- persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku- pelaku *(stakeholders)* dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya kebawah sehingga keterpihakan pada masyarakat kecil benar- benar dikedepankan.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi;
2. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi ini juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi. Begitu pula dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan

evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Kabupaten Ngawi Tahun 2025.

Akhirnya, Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi ini selesai disusun, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2025 ini.

Semoga Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat.

**BUPATI NGAWI,**

**ONY ANWAR HARSONO**